

## The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the Management (TPST) of Integrated Waste Management Sites in Kedungturi, Taman, Sidoarjo.

### Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan (TPST) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kedungturi, Taman, Sidoarjo.

Masfufah Hanim<sup>1)</sup>, Hendra Sukmana<sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*[hendrasukmana@umsida.ac.id](mailto:hendrasukmana@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study is intended to analyze the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the management of Integrated Waste Management Sites (TPST) in Kedungturi Village, Taman District, Sidoarjo Regency. The approach used is qualitative descriptive refers to Biddle & Thomas' role theory which includes four indicators, namely role expectations, role norms, role performance, and evaluation and sanctions. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation with informants selected by purposive sampling. The findings of the study indicate that BUMDes have carried out their role quite effectively in the management of TPST. In terms of role expectations, BUMDes are seen as strategic actors in waste management, although community participation is still not optimal. In the aspect of role norms, there is an integration between social norms and formal rules that are the operational guidelines of TPST. In terms of role performance, BUMDes is able to show real performance with waste management achievements of 72.1% of the total waste that comes in in 2024. Meanwhile, in the aspects of evaluation and sanctions, there is a periodic evaluation mechanism and response to public input that encourages continuous improvement. Overall, the role of BUMDes in the management of TPST has been running functionally, but it still needs to be strengthened in terms of community participation, human resource capacity, and economic sustainability to increase the effectiveness of village-based waste management.*

**Keywords - :** BUMDes, TPST, Waste Management, Role Theory, Community Participation

**Abstrak.** *Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif merujuk pada teori peran Biddle & Thomas yang meliputi empat indikator, yaitu ekspektasi peran, norma peran, performa peran, serta evaluasi dan sanksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive sampling. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa BUMDes telah menjalankan perannya secara cukup efektif dalam pengelolaan TPST. Pada aspek ekspektasi peran, BUMDes dipandang sebagai aktor strategis dalam pengelolaan sampah, meskipun partisipasi masyarakat masih belum optimal. Pada aspek norma peran, terdapat integrasi antara norma sosial dan aturan formal yang menjadi pedoman operasional TPST. Pada aspek performa peran, BUMDes mampu menunjukkan kinerja nyata dengan capaian pengelolaan sampah sebesar 72,1% dari total sampah yang masuk pada tahun 2024. Sementara pada aspek evaluasi dan sanksi, terdapat mekanisme evaluasi berkala dan respons terhadap masukan masyarakat yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, peran BUMDes dalam pengelolaan TPST telah berjalan secara fungsional, namun masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan ekonomi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis desa.*

**Kata Kunci -** BUMDes, TPST, Pengelolaan Sampah, Teori Peran, Partisipasi Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

Salah satu isu lingkungan yang banyak diperhatikan orang adalah masalah sampah. Sampah adalah sisa buangan berbentuk padat maupun setengah padat yang berasal dari aktivitas manusia, hewan, tumbuhan, maupun kegiatan di wilayah perkotaan[1]. Permasalahan sampah tidak akan pernah sepenuhnya terselesaikan, pada lingkup nasional hingga dari beragam belahan negara lingkup dunia. Isu ini pun semakin menjadi perhatian yang mendesak, Banyak upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, begitu juga bagi pemerintah daerah di mana masalah

sampah menjadi masalah besar. Peningkatan pencemaran lingkungan saat terpicu atas timbulnya sederet faktor, satu di antaranya ialah pertumbuhan populasi manusia yang menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih belum mencapai harapan yang diinginkan [2]. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada Januari 2025 Indonesia bertempat kedudukannya pada tingkat keempat lingkup dunia dibersamai dengan akumulasi penduduk meraih 283,49 juta jiwa. Pertumbuhan jumlahnya tersebut berbanding lurus dengan peningkatan volume limbah yang dihasilkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa, arus urbanisasi yang memusatkan timbulan sampah di wilayah perkotaan, serta perubahan pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif. Menyadari masalah sampah yang semakin mendesak, pemerintah daerah berperan penting dalam menerapkan solusi berkelanjutan.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan langkah strategis dalam mendorong pembangunan desa. BUMDes dapat mengelola berbagai unit usaha yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes yang mengatur aspek pendirian, pengelolaan, hingga pengembangannya di tingkat desa. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas sehingga BUMDes dapat beroperasi secara optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi desa. Sejalan dengan diimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah turut mendorong BUMDes untuk mengembangkan unit usaha berbasis lingkungan, beragam caranya mencakup pembentukan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Konsep TPST menitikberatkan pada pengelolaan sampah di setiap wilayah dengan tujuan menekan jumlah sampah, mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Neolaka (2008) menyatakan keterkaitan pengelolaan sampah telah membawa pengupayaannya tersendiri guna penciptaan keindahan lingkungan melalui proses pengolahan sampah yang dilakukan secara harmonis antara masyarakat, pengelola dan pemerintah.[4] Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPST dinilai efektif dalam mengelola sampah sejak usia dini dan dalam skala kecil di masing-masing daerah melalui beberapa tahapan proses.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK RI mencatat bahwa total produksi sampah di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 29,8 juta ton. Sebuah studi tentang pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa metode tradisional "kumpul-angkut-buang" masih menjadi yang utama[5]. Kurangnya penerapan konsep ekonomi sirkular terlihat dari belum optimalnya pelaksanaan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagaimana telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat (1) mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya juga masih tergolong rendah, sehingga program seperti bank sampah perlu terus dikembangkan dan diperluas. Pengelolaan sampah seharusnya tidak lagi berorientasi pada aktivitas "membuang", melainkan beralih pada konsep "mengelola" sebagai suatu solusi paradigmatis (Bambang M.D., 2011:252). Paradigma baru ini menggantikan sistem lama, di mana sampah tidak hanya dibuang, tetapi dikelola berdasarkan jenisnya sehingga memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan[6]. Saat ini, lebih dari 90% daerah di Indonesia masih menerapkan metode pembuangan terbuka, di mana sampah dibuang langsung ke TPA tanpa pengolahan apa pun. Timbulan sampah di TPA yang tidak dimanfaatkan akan terus menumpuk seiring waktu dan pada akhirnya memerlukan penambahan lahan baru. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak sebanding dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas.

Peningkatan volume sampah, penumpukan di TPA, serta keterbatasan lahan menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi. Kondisi penumpukan sampah tersebut terjadi akibat sistem pengelolaan sampah yang belum memenuhi standar yang ditetapkan[7]. Upaya memilah dan mengelola sampah dari sumbernya masih sangat terbatas, sehingga sampah hanya menumpuk di tempat pembuangan sampah. Secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan besar, membutuhkan banyak kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai sistem yang berkelanjutan[8]. BUMDes diharapkan mampu mengembangkan TPST sebagai unit usaha yang tidak hanya menitikberatkan pada pengelolaan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan limbah [9]. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan desa yang lebih bersih, sehat, serta mandiri secara ekonomi. Pengelolaan TPST oleh BUMDes menjadi salah satu solusi alternatif dalam menangani permasalahan sampah desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain berfungsi menekan volume sampah yang dibuang ke TPA, pengelolaan TPST juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi pengelolaan sampah yang benar dan efektif. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan potensi desa melalui BUMDes, salah satunya BUMDes Surya Sejahtera yang berlokasi di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang mulai didirikan pada tahun 2021, dengan jumlah layanan mencapai 1.850 Kartu Keluarga melalui TPST dalam pengolahan sampah. BUMDes Surya Sejahtera mengambil alih pengelolaan TPST dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK RI mencatat bahwa total produksi sampah di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 29,8 juta ton. Sebuah studi tentang pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa metode tradisional "kumpul-angkut-buang" masih menjadi yang utama[5]. Kurangnya penerapan konsep ekonomi sirkular terlihat dari belum optimalnya pelaksanaan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagaimana telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat (1) mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya juga masih tergolong rendah, sehingga program seperti bank sampah perlu terus dikembangkan dan diperluas. Pengelolaan sampah seharusnya tidak lagi berorientasi pada aktivitas "membuang", melainkan beralih pada konsep "mengelola" sebagai suatu solusi paradigmatik (Bambang M.D., 2011:252). Paradigma baru ini menggantikan sistem lama, di mana sampah tidak hanya dibuang, tetapi dikelola berdasarkan jenisnya sehingga memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan[6]. Saat ini, lebih dari 90% daerah di Indonesia masih menerapkan metode pembuangan terbuka, di mana sampah dibuang langsung ke TPA tanpa pengolahan apa pun. Timbulan sampah di TPA yang tidak dimanfaatkan akan terus menumpuk seiring waktu dan pada akhirnya memerlukan penambahan lahan baru. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak sebanding dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas.

Peningkatan volume sampah, penumpukan di TPA, serta keterbatasan lahan menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi. Kondisi penumpukan sampah tersebut terjadi akibat sistem pengelolaan sampah yang belum memenuhi standar yang ditetapkan[7]. Upaya memilah dan mengelola sampah dari sumbernya masih sangat terbatas, sehingga sampah hanya menumpuk di tempat pembuangan sampah. Secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan besar, membutuhkan banyak kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai sistem yang berkelanjutan[8]. BUMDes diharapkan mampu mengembangkan TPST sebagai unit usaha yang tidak hanya menitikberatkan pada pengelolaan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan limbah [9]. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan desa yang lebih bersih, sehat, serta mandiri secara ekonomi. Pengelolaan TPST oleh BUMDes menjadi salah satu solusi alternatif dalam menangani permasalahan sampah desa secara mandiri dan berkelanjutan. Selain berfungsi menekan volume sampah yang dibuang ke TPA, pengelolaan TPST juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi pengelolaan sampah yang benar dan efektif. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan potensi desa melalui BUMDes, salah satunya BUMDes Surya Sejahtera yang berlokasi di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang mulai didirikan pada tahun 2021, dengan jumlah layanan mencapai 1.850 Kartu Keluarga melalui TPST dalam pengolahan sampah. BUMDes Surya Sejahtera mengambil alih pengelolaan TPST dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah.

Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa permasalahan sampah masih menjadi tantangan lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Meningkatnya jumlah penduduk serta aktivitas masyarakat berdampak pada peningkatan volume sampah rumah tangga setiap harinya. Sebelum adanya pengelolaan terpadu melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pengelolaan sampah di desa masih dilakukan secara konvensional dengan pola kumpul-angkut-buang, sehingga menyebabkan penumpukan sampah dan kurang optimalnya proses pemilahan dari sumbernya. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik juga masih tergolong rendah, sehingga sebagian besar sampah bercampur dan langsung dibuang tanpa proses pengolahan lebih lanjut.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Kedungturi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Surya Sejahtera mengembangkan unit usaha berbasis lingkungan berupa TPST yang mulai dikelola

sejak tahun 2021. Kehadiran TPST menjadi salah satu bentuk implementasi pengelolaan sampah berbasis desa yang bertujuan mengurangi volume sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus menciptakan lingkungan desa yang lebih bersih dan sehat. TPST Kedungturi saat ini telah melayani sekitar 1.850 Kartu Keluarga (KK) dalam proses pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga. Secara operasional, TPST Kedungturi telah menjalankan beberapa tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, hingga pengolahan sampah yang masih memiliki nilai guna. Dalam pengelolaannya, sampah organik diubah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang ataupun dijual kepada pengepul. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh tenaga pengelola yang berada di bawah koordinasi BUMDes. Selain itu, BUMDes juga berperan dalam pengelolaan administrasi, pembiayaan operasional, serta pengembangan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Meskipun demikian, pengelolaan TPST di Desa Kedungturi masih menghadapi beberapa kendala. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga menjadi salah satu persoalan utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan TPST menyebabkan proses operasional belum berjalan secara maksimal. Kendala lain juga terlihat pada aspek keberlanjutan ekonomi, di mana hasil pengolahan sampah belum sepenuhnya mampu memberikan keuntungan yang stabil bagi operasional TPST. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga masih memerlukan pengembangan agar kapasitas pengolahan dapat lebih optimal.

Namun demikian, keberadaan TPST yang dikelola oleh BUMDes Surya Sejahtera telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Kedungturi. Pengelolaan sampah menjadi lebih terorganisir, volume sampah yang dibuang ke TPA dapat dikurangi, serta muncul kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dengan kondisi tersebut, peran BUMDes dalam pengelolaan TPST menjadi penting sebagai penggerak pengelolaan sampah berbasis desa yang berkelanjutan, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek partisipasi masyarakat, kapasitas pengelola, dan penguatan keberlanjutan ekonomi.

**Gambar 1** : Kantor Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kedungturi



Sumber : <https://maps.app.goo.gl/s5jMrZP8PvVaCHfZ7>

Pemerintah daerah mendorong BUMDes dalam pengelolaan TPST dengan memberikan bantuan teknis, pendampingan alat pengelolaan sampah, dan insentif bagi desa yang berhasil mengelola sampah secara mandiri, BUMDes memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan TPST dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan melibatkan masyarakat, BUMDes dapat menyediakan modal dan pengelolaan yang diperlukan untuk operasional TPST, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui Sosialisasi[10]. Selain itu, BUMDes juga dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah, sehingga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa Kedungturi secara keseluruhan. Program ini dikelola

melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan sampah dari sumber rumah dan pasar warga, yang kemudian dibawa ke TPST untuk dipilih berdasarkan jenisnya. Pada tahap pengelolaan sampah selanjutnya, sampah yang dapat diolah akan didaur ulang menjadi bahan baku baru, dan sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut akan dikirim ke TPA. Berikut hasil rekapitulasi volume sampah TPA setelah dipilah di TPST tahun 2024.

**Tabel 1.** Rekapitulasi volume sampah TPA setelah pemilahan di TPST tahun 2024

No.	Bulan	Total Sampah Masuk (kg)	Volume sampah dibuang ke TPA (kg)	Volume sampah yang dikelola oleh TPST (kg)	Presentase Sampah yang Terkelola (%)
1.	Januari	200 kg	60 kg	140 kg	70 %
2.	Februari	195 kg	55 kg	140 kg	72 %
3.	Maret	210 kg	70 kg	140 kg	67 %
4.	April	205 kg	50 kg	155 kg	76 %
5.	Mei	198 kg	58 kg	140 kg	71 %
6.	Juni	215 kg	60 kg	155 kg	72 %
7.	Juli	220 kg	55 kg	165 kg	75 %
8.	Agustus	190 kg	50 kg	140 kg	74 %
9.	September	225 kg	60 kg	165 kg	73 %
10.	Oktober	185 kg	65 kg	120 kg	65 %
11.	November	200 kg	45 kg	155 kg	78 %
12.	Desember	230 kg	60 kg	170 kg	74 %
	<b>Total</b>	<b>2.473kg</b>	<b>688 kg</b>	<b>1.785 kg</b>	
			<b>Rata-Rata Tertimbang</b>		<b>72,1</b>

*Sumber : Diolah dari Desa Kedungturi BUMDes (2025)*

Berdasarkan data tersebut, secara kumulatif TPST Kedungturi mampu mengelola 72,1% dari total sampah yang masuk sepanjang tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar timbunan sampah telah diproses di tingkat desa sebelum dikirim ke TPA, sehingga berkontribusi dalam mengurangi beban penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir. Presentase 72,1% diperoleh dari perhitungan deskriptif terhadap total volume sampah yang dikelola selama tahun 2024 dibandingkan dengan total volume sampah yang masuk ke TPST. Perhitungan ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai capaian pengelolaan sampah secara kumulatif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program BUMDes masih belum optimal. Misalnya, penelitian oleh Elma Lazuardiah et al. (2020) Penelitian berjudul "Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur)" mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan desa wisata masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya motivasi, sosialisasi yang belum optimal, serta kendala dalam proses perizinan produk tertentu. Di samping itu, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUMDes juga masih terbatas. Sementara itu, Peneliti lain berjudul "Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Berbasis pertanian dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" Zunaidal,dkk.(2021) menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam pengembangan UMKM, antara lain melalui penguatan permodalan, perluasan akses pasar, serta penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut sejalan dengan upaya dalam mengidentifikasi strategi BUMDes guna meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat desa[12].

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan terkait pembangunan Situs Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Kedungturi, Taman.[13] Pengelolaan TPST di Desa Kedungturi dihadapkan pada berbagai dinamika yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, diantaranya meliputi (1) keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung operasional pengelolaan TPST, 920 rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah, serta 930 tantangan dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dari sistem pengelolaan tersebut. Di sisi lain, meskipun berbagai penelitian telah mengkaji peran BUMDes dalam sektor ekonomi, khususnya pariwisata, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik menganalisis (4) peran BUMDes dalam pengelolaan lingkungan serta (5) pengelolaan TPST yang berbasis data empiris. Kondisi ini

menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghadirkan kajian yang lebih kontekstual dan berbasis pada realitas lapangan guna mengisi kesenjangan penelitian yang ada.

Berdasarkan topik penelitian yang telah disebutkan, penulis ingin menggali temuan penelitian berjudul "Peran BUMDes dalam Pengelolaan TPST di Desa Kedungturi, Taman, Sidoarjo" dengan menggunakan Teori Peran; Biddle & Thomas mengembangkan teori ini dengan menekankan bahwa peran dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur dan membatasi tindakan yang diharapkan dari individu yang menempati posisi tertentu. Dalam konteks ini, BUMDes diposisikan sebagai pelaku sosial yang memiliki peran strategis dalam pembangunan desa, termasuk pengembangan TPST. [14] Peran ini dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak lain melalui beberapa indikator, antara lain: 1) Peran Harapan, terdefinisi menjadi harapan yang peruntukkan bagi seseorang terkait dengan perilaku yang sepadan bersama realitas yang ditunjukkan oleh individu yang membawa kepemilikan peran terkhusus. 2) Peran Norma, yang merupakan salah satu aturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan kewajiban. 3) Peran Pweforma, yaitu peran yang diwujudkan dalam perilaku seseorang dalam menampilkan bentuk perilakunya, bentuk tersebut diwujudkan melalui kegiatan dalam menjalankan tugas, prinsip, dan fungsinya. 4) Peran Evaluasi & Sanksi, evaluasi akan diarahkan pada pemberian pesan disertai aspek kesan positif serta kesan negatif berdasarkan harapan banyak orang terhadap peran yang dilakukan.

## II. METODE

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada peran BUMDes dalam pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Kedungturi. Metode deskriptif kualitatif diterapkan untuk meneliti kondisi suatu objek atau fenomena melalui penyajian penjelasan yang mengguraikan fakta lapangan secara jelas, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan data. Sugiyono, menyatakan bahwa metode deskriptif terdefinisi lebih lanjut menjadi pendekatan demi teranalisisnya data yang dijalankan dengan cara mempresentasikan data yang berhasil terhimpun, tanpa upaya menarik kesimpulan generalisasi. [15]. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan peran BUMDes dalam pengelolaan TPST di Desa Kedungturi. Tempat yang dipilih untuk penelitian ini adalah Desa Kedungturi yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, karena ada indikasi bahwa ada permasalahan yang perlu diteliti.

Penelitian ini menggunakan konsep Role Theory sebagai kerangka analisis untuk menelaah peran BUMDes, yang diukur melalui empat indikator: 1) Peran Harapan, 2) Peran Norma, 3) Peran Performa, dan 4) Peran Evaluasi & Sanksi. Pengumpulan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sumber secara sengaja guna mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sebab narasumber dianggap memiliki pengetahuan yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan alasan atau pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih meliputi Ketua TPST, Bendahara TPST, Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes, Sekretaris BUMDes, serta warga Kedungturi. Penelitian ini menghimpun data primer dan sekunder melalui observasi serta wawancara. Dilaksanakannya analisis data dengan integrasi model Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data merupakan proses mendapatkan informasi dari lapangan; reduksi data dilakukan melalui pemilihan dan penyaringan informasi yang terkumpul; sementara penyajian data melibatkan penyusunan informasi yang sudah diolah guna menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata "peran" berasal dari istilah "*pe-ran*", yang mengacu pada posisi yang dipegang oleh seseorang atau tindakan yang diambil dalam suatu situasi. Menurut Hanafi, peran mencakup tindakan yang diambil oleh individu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatan yang dipegang. Peran ini dianggap penting karena mempengaruhi perilaku individu. Kemudian Menurut Berry, Peran berkaitan dengan tugas yang mengarahkan individu dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Peran dapat dimaknai sebagai sekumpulan harapan yang melekat pada individu yang menempati posisi sosial tertentu. Penetapan peran tersebut dipengaruhi oleh norma-norma yang diterapkan di masyarakat, sehingga individu dituntut untuk memenuhi ekspektasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun peran lainnya.

Untuk menilai sejauh mana seseorang melaksanakan peran yang melekat pada suatu posisi atau jabatan, hal itu bisa diamati dari perilaku dan tindakan yang ditunjukkan saat menjalankan posisi tersebut. Menurut Biddle & Thomas, indikator perilaku yang berkaitan dengan peran meliputi sebagai berikut:

#### A. Peran Harapan

"Peran merupakan seperangkat harapan yang diarahkan kepada individu sesuai dengan posisi atau kedudukan yang dimilikinya" [16]

. Indikator Peran yang Diharapkan adalah penilaian yang mengacu pada harapan atau harapan yang dimiliki oleh masyarakat, pemerintah desa, dan pihak lain terhadap peran yang harus dimainkan oleh BUMDes dalam pengembangan TPST. Harapan ini merupakan pandangan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Dalam perspektif Teori Peran Biddle & Thomas Peran Harapan merupakan seperangkat ekspektasi sosial yang bersifat normatif dan menjadi standar perilaku bagi aktor yang menempati posisi tertentu. Artinya, BUMDes tidak semata-mata diposisikan sebagai lembaga ekonomi desa, melainkan juga sebagai aktor strategis yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial bersama. BUMDes diharapkan dapat menjadi motor mobilisasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang efektif dan efisien, serta mampu menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian desa. Berikut informasi dari wawancara dengan Sekretaris BUMDes di Kedungturi, Taman:

*"Masyarakat menginginkan BUMDes menjadi pemimpin dalam penataan dan pengelolaan sampah di desa, dengan tujuan utama mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Tidak hanya itu, pemerintah desa juga memiliki harapan besar agar BUMDes dapat berinovasi dalam pengelolaan sampah, misalnya dengan mengembangkan produk daur ulang atau memanfaatkan sampah untuk energi terbarukan."* (Diakses 20 April 2025).

Harapan ini menunjukkan bahwa peran BUMDes tidak hanya terbatas sebagai pelaksana teknik pengelolaan sampah, sambil menekankan peran sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi di tingkat desa. Dalam hal ini, BUMDes dituntut untuk dapat mengembangkan strategi pengelolaan yang komprehensif, mulai dari edukasi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana, hingga penciptaan nilai tambah dari sampah.

Penambahan tersebut dari Sekretaris BUMDes Kedungturi.

*"Kami juga berharap TPST Kedungturi dapat beroperasi secara optimal meski dengan masalah ketidakstabilan harga sampah yang sudah disortir saat ini..."* (wawancara 20 April 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa harapan tidak hanya datang dari masyarakat kepada BUMDes, tetapi juga muncul dari internal BUMDes terhadap keberlanjutan operasional TPST. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik ekspektasi antar masyarakat dan pengelola, yang membentuk dinamika peran dalam pengelolaan TPST.

Harapan yang ada berupa partisipasi masyarakat dalam program TPST telah diimplementasikan dengan baik melalui berbagai inisiatif dan kegiatan yang melibatkan warga desa. Masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam berkontribusi dalam proses pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan sampah, menunjukkan kesadaran dan komitmen mereka terhadap pengembangan TPST. Selain itu, BUMDes telah mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk menambah wawasan masyarakat mengenai urgensi pengelolaan sampah secara tepat, yang kemudian direspon positif oleh masyarakat.

**Tabel 2.** Berikut rekapitulasi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan BUMDes bersama warga Desa Kedungturi pada bulan Februari-April 2025:

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Jumlah Partisipan
1.	Sosialisasi edukasi pemilahan sampah	Februari 1, 2025	1,35 %
2.	Sosialisasi edukasi pengelolaan sampah	Maret 15, 2025	1,62 %
3.	Sosialisasi tingkat pengumpulan sampah	30 April 2025	1,51 %

*Sumber : Diolah dari Desa Kedungturi BUMDes (2025)*

Berdasarkan Tabel 2, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BUMDes Desa Kedungturi selama periode Februari hingga April 2025 berada rentang 1,3% hingga 1,62% dari total KK 1.850 KK yang menjadi cakupan layanan TPST, dengan partisipasi tertinggi tercatat pada kegiatan sosialisasi edukasi pemilahan sampah sebesar 1,35%, sementara kegiatan sosialisasi tingkat pengumpulan sampah menunjukkan partisipasi sebesar 1,51%. Rentang presentase yang relatif terbatas tersebut mempresentasikan variasi kehadiran masyarakat pada masing-masing kegiatan sekaligus menggambarkan proporsi keterlibatan masyarakat terhadap keseluruhan jumlah KK sasaran.

Faktor-faktor di atas dikaitkan dengan Teori Peran Biddle&Thomas, bahwa harapan berfungsi sebagai standar normatif yang mengarah perilaku aktor. Harapan masyarakat Desa Kedungturi terhadap BUMDes telah membentuk peran ideal yang harus dijalankan dalam pengelolaan TPST.

Capaian pengelolaan sampah sebesar 72,1% sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian harapan lingkungan, khususnya dalam mengurangi timbunan sampah ke TPA, telah terealisasi. Namun demikian, dari sisi partisipasi masyarakat dan stabilitas ekonomi akibat fluktuasi harga sampah, masih terdapat tantangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan ideal dan realitas operasional.

Dengan demikian, indikator peran harapan dalam penelitian ini dapat dikatakan telah terbentuk secara sosial dan normatif, serta mulai diimplementasikan dalam praktik, meskipun masih memerlukan optimalisasi agar selaras sepenuhnya dengan harapan masyarakat dan peran pemerintah desa dalam merealisasikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

## B. Peran Norma

Indikator norma dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana ekspektasi yang berkembang di lingkungan masyarakat dan aparat desa membentuk pola perilaku dalam pelaksanaan pengelolaan TPST oleh BUMDes di Desa Kedungturi. Dalam perspektif teori peran yang dikemukakan oleh Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas, norma dipahami sebagai seperangkat harapan yang mengarahkan tindakan individu sesuai dengan posisi sosial yang dimilikinya. Ekspektasi tersebut terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu ekspektasi prediktif dan harapan normatif, di mana harapan normatif selanjutnya dapat dibedakan menjadi bentuk eksplisit (terbuka) dan tersirat (tersembunyi).

Dalam konteks pengelolaan TPST Kedungturi, ekspektasi prediktif tercermin dari keyakinan masyarakat bahwa keberadaan TPST mampu menjadi solusi terhadap permasalahan sampah yang terus meningkat. Meskipun tidak selalu diungkapkan secara langsung, ekspektasi ini membentuk persepsi kolektif mengenai peran yang seharusnya dijalankan oleh pengelola BUMDes. Sementara itu, harapan normatif eksplisit terlihat melalui adanya arahan langsung dari aparat desa yang menuntut pengelolaan TPST dilakukan secara terstruktur dan bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala BUMDes Kedungturi:

*"Kami secara terbuka menyampaikan kepada pengelola BUMDes bahwa pengelolaan TPST dilakukan dengan baik dan teratur. Warga juga berharap TPST ini dapat menjadi solusi dari permasalahan sampah yang semakin menumpuk." (Wawancara pada 20 April 2025).*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ekspektasi yang disampaikan secara terbuka telah menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional TPST, termasuk dalam pengaturan jadwal kegiatan, sistem pelaporan, serta koordinasi antar pihak terkait.

Di sisi lain, harapan normatif tersirat berkembang melalui kesadaran sosial yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, namun tetap memengaruhi perilaku pengelola. Hal ini tercermin dari pernyataan berikut:

*"Kami merasa bertanggung jawab karena memang ada harapan dari masyarakat dan desa. Meskipun tidak semuanya disampaikan secara langsung, kami tahu bahwa masyarakat menginginkan lingkungan yang bersih..." (Wawancara, 20 April 2025).*

Selain itu, salah satu tokoh masyarakat juga menyampaikan bahwa:

*"Saya pribadi belum pernah menyampaikannya secara langsung, tapi saya kira semua warga ingin TPST berjalan lancar..." (Wawancara, 20 April 2025).*

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa norma sosial dalam masyarakat Kedungturi tidak hanya bekerja melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui ekspektasi kolektif yang hidup dalam interaksi sosial sehari-hari. Harapan yang bersifat tersirat ini berperan sebagai tekanan sosial sekaligus standar etis yang mendorong pengelola untuk menjalankan perannya secara konsisten dengan nilai-nilai kebersihan dan tanggung jawab lingkungan. Dengan demikian, keberadaan ekspektasi prediktif serta harapan normatif, baik yang bersifat eksplisit

maupun tersirat, menunjukkan bahwa norma berfungsi sebagai kerangka yang mengarahkan perilaku aktor dalam menjalankan perannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas yang menegaskan bahwa perilaku peran terbentuk melalui internalisasi harapan sosial yang berkembang di lingkungan individu, baik yang dinyatakan secara langsung maupun yang bersifat implisit. Norma dalam pengelolaan TPST Kedungturi terbentuk dari perpaduan antara harapan yang disampaikan secara terbuka dan yang berkembang secara tersirat, yang secara bersama-sama mengarahkan perilaku pengelola BUMDes dalam menjalankan perannya.

### C. Peran Performa

Perilaku yang terlihat dalam suatu peran dihasilkan oleh individu yang melakukan peran itu. Berbeda dengan norma harapan, perilaku ini adalah manifestasi nyata. Selain itu, perilaku nyata ini juga bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Role Performance mengacu pada tindakan konkret atau perilaku nyata yang ditunjukkan oleh aktor dalam menjalankan perannya. Dalam konteks pengelolaan TPST di Desa Kedungturi, BUMDes tidak hanya menjalankan perannya berdasarkan norma atau harapan masyarakat, tetapi juga telah menunjukkan perilaku nyata yang dapat diamati langsung dalam operasional sehari-hari. Berikut informasi dari wawancara dengan Sekretaris BUMDes di Desa Kedungturi.

*"Kami dari BUMDes langsung menuju pendirian dan pemantauan TPST di Kedungturi, dan melakukan beberapa koordinasi dengan RT/RW untuk mengedukasi warga terkait sosialisasi dan penyelesaian konflik. Meski belum optimal, kami sudah mencoba menjalankan peran ini dalam kehidupan nyata di lapangan" (wawancara 20 April 2025).*

Wujudnya peran BUMDes dalam pengelolaan TPST di Desa Kedungturi terlihat jelas melalui keterlibatan aktif mereka dalam berbagai aspek operasional dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah. Tidak hanya berhenti di tingkat perencanaan, BUMDes menunjukkan perilaku nyata dengan berkoordinasi secara rutin dengan pengelola TPST, mendukung kegiatan sosialisasi, dan memberikan pendampingan nyata berupa alokasi anggaran untuk revitalisasi, salah satunya atap di TPST yang menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan TPST. Berikut ini adalah hasil informasi dari wawancara dengan Bendahara BUMDes di Kedungturi.

*"Salah satu permasalahan utama di TPST saat itu adalah kondisi atap yang rusak. Saat hujan, air masuk ke area pengelolaan dan sangat mengganggu aktivitas petugas. Melihat kondisi tersebut, kami dari BUMDes memutuskan untuk mengalokasikan dana untuk memperbaiki atap TPST. Revitalisasi atap ini menjadi prioritas agar proses pengelolaan sampah dapat berjalan lebih aman dan nyaman, terutama saat musim hujan..." (wawancara 21 April 2025).*

**Gambar 2** : Kondisi atap TPST Kedungturi setelah revitalisasi :



**Sumber:** <https://maps.app.goo.gl/s5jMrZP8PvVaCHZ7>

Gambar 2 menunjukkan kondisi fisik atap TPST Kedungturi setelah dilakukan proses revitalisasi oleh BUMDes. Secara visual, terlihat bahwa struktur atap telah diperbaiki sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap area pengelolaan sampah, khususnya dari paparan air hujan. Perbaikan ini berimplikasi pada terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung kelancaran aktivitas operasional petugas TPST. Dokumentasi tersebut menjadi bukti empiris bahwa intervensi BUMDes tidak hanya bersifat administratif atau koordinatif, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata berupa perbaikan sarana prasarana. Dengan demikian, gambar ini merepresentasikan bentuk konkret dari role performance yang dijalankan oleh BUMDes dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan TPST.

Ketua mitra TPST RT di Desa Kedungturi.

*"Saya melihat langsung ketika perbaikan atap dilakukan, memang sebelumnya kondisinya bocor dan membahayakan petugas. Namun, sejak BUMDes melakukan intervensi untuk memperbaiki atap, sekarang lebih aman dan bersih. Warga juga percaya bahwa ada lebih banyak yang harus disimpan sampah di TPST."*(wawancara 21 April 2025).

Selain tindakan koordinatif dan revitalisasi fasilitas, capaian kuantitatif pengelola sampah juga memperkuat indikator peran performa. Berdasarkan rekapitulasi data tahun 2024, TPST Kedungturi mampu mengelola sebesar 72,1% dari total volume sampah yang masuk sebelum dikirim ke TPA. Angka ini menunjukkan bahwa peran BUMDes tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah diwujudkan dalam kinerja operasional yang terukur dalam mengurangi beban sampah desa.

Dalam perspektif Teori Biddle & Thomas, capaian tersebut merepresentasikan kesesuaian antara peran ideal dan perilaku aktual (peran performa). Artinya, ekspektasi masyarakat terhadap BUMDes sebagai pengelola lingkungan telah diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang berdampak langsung terhadap efektivitas pengelolaan TPST.

Faktor-faktor di atas dikaitkan dengan Teori Peran; Biddle & Thomas. BUMDes sebenarnya memberikan tindakan seperti revitalisasi fisik TPST dan turut serta menjembatani kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan. Dengan demikian BUMDes Kedungturi menunjukkan bahwa peran ideal telah berjalan sejalan dengan perilaku aktual di lapangan, yang mendukung keberlanjutan program TPST sehingga sesuai dengan Teori Peran; Biddle & Thomas tentang Bentuk Pelaku. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap perlu dipahami secara proporsional karena masih terdapat kendala pada aspek partisipasi masyarakat dan stabilitas ekonom pengelolaan sampah, sehingga optimalisasi peran performa BUMDes masih memerlukan penguatan berkelanjutan.

#### **D. Peran Evaluasi & Sanksi**

Dalam indikator ini, Biddle & Thomas menyatakan bahwa evaluasi dan penerapan sanksi didasarkan pada ekspektasi publik terhadap norma-norma yang ada. Berdasarkan norma-norma ini, individu memberikan penilaian positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Di sisi lain, sanksi dapat diartikan sebagai bentuk usaha seseorang dalam menjaga nilai-nilai positif maupun mengubah peran yang semula dipandang negatif menjadi lebih positif. Menurut Biddle & Thomas, proses penilaian dan pemberian sanksi tersebut dapat bersumber baik dari orang lain maupun dari diri sendiri.

Dalam konteks pengelolaan TPST di Kedungturi, norma-norma yang terbentuk di masyarakat berperan penting dalam menilai apakah perilaku BUMDes, Pengelola TPST dan masyarakat sesuai dengan harapan sosial atau tidak. Penilaian peran yang dilakukan muncul melalui respon sosial nyata berupa dukungan, partisipasi, dan kritik. Hasil pengamatan di lapangan, Ketika BUMDes aktif mendukung revitalisasi fasilitas TPST dan terlibat dalam pemantauan pelaporan bulanan, masyarakat memberikan kesan positif berupa kepercayaan dan dukungan terhadap program tersebut. Di sisi lain, ketika terjadi keterlambatan pengangkutan sampah atau kurangnya komunikasi antara pengelola dan warga, masyarakat menunjukkan penilaian negatif, melalui keluhan atau penurunan partisipasi. Berikut hasil wawancara dengan Ketua TPST di Desa Kedungturi, Taman.

*"Kami sering menerima masukan dari warga, terutama jika ada jadwal transportasi yang terlambat atau jika sampah menumpuk terlalu lama. Jika sudah, kami segera berkoordinasi dengan petugas dan melapor kepada Manajer BUMDes dan Manajer TPST. Jika kami lambat merespons, warga dapat memprotes, tetapi jika kami merespons dengan cepat, biasanya warga berpartisipasi dalam pembersihan."*(wawancara 21 April 2025).

Pengelolaan BUMDes di Desa Kedungturi, Taman.

*"Kami melihat bahwa masyarakat memberikan kepercayaan jika pengelolaannya berjalan dengan baik. Namun jika ada kekurangan, seperti laporan yang tidak tepat waktu atau fasilitas yang tidak diperbaiki, mereka juga akan menegur. Itu adalah alarm bagi kami untuk memperbaiki sistem. Bahkan dari pihak kami sendiri, kami juga menerapkan evaluasi rutin untuk pengelola TPST..."*(wawancara 21 April 2025).

**Tabel 3.** Berikut ini adalah rekapitulasi jenis-jenis penilaian/sanksi di kedungturi, Taman :

No	Jenis Penilaian/Sanksi	Bentuk Respons/Dampak	Sumber Pengawasan
----	------------------------	-----------------------	-------------------

1	Penilaian Positif	Dukungan masyarakat untuk program daur ulang	Warga
2	Penilaian Negatif	Keluhan warga tentang jadwal transportasi yang tidak tepat	Warga
3	Sanksi Sosial Langsung	Forum RT/RW	Warga
4	Sanksi Internal	Evaluasi Bulanan dan Perbaikan SOP Manajemen	Manajer TPST / BUMDes
5	Peningkatan Peran (Respons)	Pengadaan Pelatihan dan Peningkatan Fasilitas	Tindak Lanjut BUMDes

*Sumber : diolah oleh peneliti 2025*

Faktor-faktor di atas dikaitkan dengan Teori Peran; Biddle & Thomas. Oleh karena itu, evaluasi dan sanksi merupakan bagian penting dalam menjaga pelaksanaan peran sesuai dengan harapan publik. Di Desa Kedungturi, proses evaluasi dilakukan secara berkala oleh BUMDes terhadap kinerja pengelola TPST, baik dari segi pelaporan, operasional sehari-hari, maupun pelayanan kepada masyarakat.

BUMDes merespon evaluasi dengan memberikan tindakan korektif, seperti melakukan pelatihan manajer, menata ulang sistem pelaporan, dan merotasi petugas jika diperlukan. Sanksi tersebut bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendorong perbaikan sehingga peran yang sebelumnya dianggap kurang dapat dikembalikan ke arah yang sesuai dengan norma dan harapan masyarakat.

Dengan demikian, BUMDes Kedungturi telah menjalankan peran idealnya tidak hanya dalam pengelolaan teknis TPST, tetapi juga dalam hal penegakan, evaluasi, dan sanksi yang konstruktif. Ini sejalan dengan Teori Peran; Biddle & Thomas, bahwa evaluasi dan sanksi berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa perilaku tetap dalam koridor peran yang diharapkan, sehingga tujuan pengelolaan TPST yang berkelanjutan dapat tercapai.

## VII. SIMPULAN

Berdasar dari temuan penelitiannya yang berhasil teridentifikasi, kesimpulan yang diambil ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kedungturi telah melaksanakan perannya dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah (TPST) secara relatif efektif. Pada aspek peran harapan (role expectation), BUMDes diposisikan sebagai aktor strategis dalam pengelolaan sampah berbasis desa, meskipun tingkat partisipasi masyarakat masih memerlukan penguatan. Pada aspek peran norma (role norms), ditemukan adanya integrasi antara norma sosial, baik yang bersifat tersurat maupun tersurat, dengan norma formal kelembagaan, seperti jadwal operasional, sistem iuran, dan mekanisme koordinasi, yang berfungsi sebagai instrumen pengatur dan pengendali perilaku pengelola. Pada aspek peran performa (role performance), BUMDes telah menunjukkan implementasi nyata melalui capaian pengelolaan sampah sebesar 72,1%, meskipun masih dihadapkan pada kendala terkait partisipasi masyarakat dan keberlanjutan ekonomi operasional. Sementara itu, pada aspek evaluasi (role evaluation), pengelolaan TPST telah didukung oleh mekanisme koordinasi serta upaya perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, berdasarkan perspektif Teori Peran Biddle & Thomas, peran BUMDes dalam pengelolaan TPST telah berjalan secara fungsional, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai tingkat efektivitas dan keberlanjutan yang lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem kelembagaan melalui penegasan aturan formal, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang terarah, serta penguatan aspek ekonomi melalui inovasi pengelolaan sampah yang bernilai tambah guna mendukung keberlanjutan operasional TPST.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bantuan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan pengorbanan tanpa henti.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Hendra Sukmana selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, teman-teman seperjuangan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan, kebaikan, dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

## REFERENSI

- [1] Hia, E. E. "Peran dewan pengawas dalam meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Tangerang." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*, 11(2), 35-51. (2019).
- [2] Rahayu, A., & Yani, MT "Peran Guru SMK Prapanca 2 Surabaya dalam Menumbuhkan Toleransi Siswa." *Studi Moral dan Kewarganegaraan*, 8(3), 962-967. (2020).
- [3] Lazuardiah, E., Balafif, M., & Rahmasari, A. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur)." *Bharanomik*, 1(1), 9-16. (2020).
- [4] Zunaidah, A., Askafi, E., & Daroini, A. "Peran bisnis berbasis pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat." *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 21(1), 47-57. (2021).
- [5] Dahananta, R., Sholihah, L., & IP, M. T. "Peran Camat dalam Peningkatan Kemampuan Pegawai di Kabupaten Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur."
- [6] Prihartini, I., & Choiriyah, I. U. "Peran BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Desa dan Keberlanjutan Masyarakat." *Jurnal Pengembangan Kebudayaan dan Masyarakat Indonesia*, 15(3), 10-21070. (2024).
- [7] Tjiptady, B. C., Rahman, R. Z., Pradani, Y. F., Sulaiman, M. S., Machfuroh, T., & Saepuddin, A, "Sosialisasi peningkatan perekonomian masyarakat melalui badan usaha milik desa di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang." *I-Com: Indonesian Community Journal*, vol.1, no.1, hlm. 35-40, 2021.
- [8] Lingga, L. J., Yuana, M., Sari, N. A., Syahida, H. N., Sitorus, C., & Shahron, S, "Sampah di Indonesia: Tantangan dan solusi menuju perubahan positif." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol.4, no.4, hlm. 12235-12247, 2024.
- [9] Widyastuti, A. E. S, "Pentingnya collaborative governance dalam pengelolaan sampah: studi kasus mekanisme pengelolaan sampah berbasis zero waste di TPS Go-Sari dan TPA BLE Banyumas." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol.4, no.3, hlm. 3163-3176, 2025.
- [10] Sholihah, K. K. A., & Hariyanto, B, "Kajian tentang pengelolaan sampah di Indonesia." *Swara Bhumi*, vol.3,no.03, hlm. 1-9, 2020.
- [11] Sari, K., & Nabella, R. S, "Potensi Lokal dan Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES): Studi Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang." *In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, vol. 1, no. 2, hlm. 09-114,2021.
- [12] Zunaidah, A., Askafi, E., & Daroini, A, "Peran usaha bumdes berbasis pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat." *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, vol.21, no.1, hlm. 47-57, 2021.
- [13] Wafa, A., & Angin, R, "Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, vol.9, no.1, hlm. 1-14, 2024.
- [14] Yamada, S., & Setyowati, R. N, "Peran guru dalam mengatasi tindakan school bullying sebagai upaya mewujudkan sekolah ramah anak di smp negeri 2 wates kab. Kediri". *Journal of Civics and Moral Studies*, vol.7, no. 1,hlm. 30-43, 2022.
- [15] Subekti, A., & Susanto, A, "Pengaruh kemampuan praktek mata kuliah teknologi motor bensin terhadap kesiapan menghadapi praktek kerja industri mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo." *Auto Tech: Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo*, vol.16 ,no.2,hlm. 86-97, 2021.

[16] B.J. Biddle and Thomas, *Role Theory : Concepts & Research*,1966

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*